



Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Konsumsi Pangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2025

Lalu Kurniawan*, Taslim Sjah, Hayati

Progam Studi Magister Pertanian Lahan Kering, Pascasarjana, Universitas Mataram, Jl.

Pendidikan No. 37, Dasan Agung Baru, Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: kurniawanlalu89@gmail.com

Abstrak

Kualitas konsumsi pangan merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, kualitas konsumsi pangan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi tantangan berupa diversifikasi pangan yang belum optimal dan disparitas antarwilayah. Di sisi lain, kajian mengenai perkembangan kualitas konsumsi pangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTB masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Konsumsi dan Pengeluaran periode Maret 2021–2025 serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, sehingga diperoleh 50 observasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan kualitas konsumsi pangan berdasarkan indikator Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan analisis inferensial menggunakan regresi linear berganda berbentuk log-log dengan variabel pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor PPH cenderung meningkat, meskipun disparitas antarwilayah masih terjadi. Pendapatan per kapita dan pangsa pengeluaran pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor PPH. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan jumlah penduduk dan IHK tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,607 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 60,7 persen variasi skor PPH. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bergizi.

Kata kunci: Kualitas Konsumsi Pangan; Pola Pangan Harapan (PPH); Pangsa Pengeluaran Pangan.

Trends and Determinants of Food Consumption Quality across Regencies/Municipalities in West Nusa Tenggara Province, 2021–2025

Abstract

Food consumption quality is an important indicator in supporting food security and improving the quality of human resources. However, food consumption quality in the regencies/cities of West Nusa Tenggara Province (NTB) still faces challenges, particularly limited food diversification and regional disparities. In addition, studies on the development of food consumption quality and the factors affecting it at the regency/city level in NTB remain limited. This study aims to analyze the development of food consumption quality and the factors affecting it in the regencies/cities of West Nusa Tenggara Province during the period 2021–2025. This study employed a quantitative method with descriptive and inferential approaches. The data used were secondary data obtained from the National Socioeconomic Survey (SUSENAS) Consumption and Expenditure Module for March 2021–2025 and publications of Statistics Indonesia (BPS) covering 10 regencies/cities in NTB, resulting in 50 observations. Descriptive analysis was conducted to describe the development of food consumption quality based on the Food Consumption Pattern Score (PPH), while inferential analysis was performed using a log-log multiple linear regression model with per capita income, food expenditure share, education level, population size, and Consumer Price Index (CPI) as independent variables. The results showed that the PPH score tended to increase during the study period, although regional disparities still persisted. Per capita income and food expenditure share had a positive and significant effect on the PPH score. Education level had a negative and significant effect, while population size and CPI had no significant effect. The Adjusted R^2 value of 0.607 indicates that the model explained 60.7 percent of the variation in the PPH score. These findings suggest the need to strengthen local food-based diversification and improve access to diverse and nutritious foods to enhance food consumption quality.

Keywords: Food Consumption Quality; Desirable Dietary Pattern (DDP); Share of Food Expenditure.

How to Cite: Kurniawan, L., Sjah, T., & Hayati, H. (2026). Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Konsumsi Pangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2025. *Empiricism Journal*, 7(2), 1295-1314. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5468>



PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis pembangunan karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial ekonomi, dan keberlanjutan wilayah. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitasnya (FAO, 1996). Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), ketahanan pangan menjadi bagian dari tujuan kedua yang menekankan penghapusan kelaparan, perbaikan gizi, dan pertanian berkelanjutan (Gil et al. 2019). Dengan demikian, fokus pembangunan pangan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kualitas konsumsi masyarakat.

Kualitas konsumsi pangan diukur menggunakan Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu indikator yang menggambarkan keseimbangan kontribusi energi antar kelompok pangan. Semakin tinggi skor PPH, semakin baik kualitas konsumsi pangan masyarakat (Badan Pangan Nasional, 2023). Menurut Ariani dan Ashari (2003) dalam Yuniarti *et al.* (2022), skor PPH dapat digunakan sebagai indikator evaluasi mutu konsumsi pangan karena mampu menggambarkan keseimbangan pola konsumsi masyarakat terhadap komposisi pangan ideal. Komposisi ideal PPH nasional disajikan pada Tabel 1 sebagai standar pembandingan kondisi aktual di daerah.

Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	Pola Pangan Harapan Nasional				Skor PPH Maksimum
			Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi-padian	40,0 - 60,0	289	1050	50,0	0,5	25,0
2	Umbi-umbian	0,0 - 8,0	105	126	6,0	0,5	2,5
3	Pangan Hewani	5,0 - 20,0	157	252	12,0	2,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0 - 15,0	21	210	10,0	0,5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,0 - 3,0	11	63	3,0	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	2,0 - 10,0	37	105	5,0	2,0	10,0
7	Gula	2,0 - 15,0	31	105	5,0	0,5	2,5
8	Sayur dan Buah	3,0 - 8,0	262	126	6,0	5,0	30,0
9	Aneka Bumbu dan Bahan Minuman	0,0 - 5,0	-	63	3,0	0,0	0,0
	Jumlah			2100	100,0	-	100,0

Sumber : Badan Pangan Nasional (2023)

Secara empiris, konsumsi pangan nasional masih didominasi kelompok padi-padian, yang menunjukkan bahwa diversifikasi pangan belum optimal meskipun Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang beragam (Badan Pangan Nasional, 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara pola konsumsi aktual dan komposisi ideal PPH. Dominasi konsumsi pangan pokok yang tinggi umumnya diikuti oleh rendahnya konsumsi pangan sumber protein hewani, sayur, dan buah yang justru memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat (FAO et al. 2023). Oleh karena itu, peningkatan kualitas konsumsi pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan energi, tetapi juga oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan.

Kondisi tersebut juga terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memiliki basis ekonomi pertanian kuat dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan (BPS NTB, 2026). Provinsi NTB merupakan salah satu daerah penghasil pangan penting di kawasan timur Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap produksi padi, jagung, sapi potong, dan komoditas pangan lainnya. Namun

demikian, tingginya potensi produksi pangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya paradoks pangan, yaitu kondisi ketika wilayah dengan kapasitas produksi pangan yang relatif tinggi masih menghadapi kualitas konsumsi pangan yang belum optimal (Béné et al. 2021). Paradoks tersebut menjadi isu penting karena menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang memadai tidak secara otomatis menjamin tercapainya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Di sisi lain, jumlah penduduk Provinsi NTB meningkat dari 5,387 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 5,731 juta jiwa pada tahun 2025 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,56 persen per tahun (BPS NTB, 2026). Pertumbuhan penduduk tersebut meningkatkan tekanan terhadap sistem pangan daerah, baik dari sisi penyediaan maupun pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat (Debebe & Zekarias, 2020; Fukase & Martin, 2020). Apabila peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perbaikan akses terhadap pangan bergizi, maka kualitas konsumsi pangan berpotensi mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.

Dari sisi sosial ekonomi, pendapatan per kapita merupakan faktor utama yang memengaruhi kualitas konsumsi pangan. Peningkatan pendapatan meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang lebih beragam dan bergizi sehingga mendorong peningkatan skor PPH (Rinaldi et al. 2017). Menurut Timmer et al. (1983) yang dikutip dalam Fukase & Martin (2020) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong pergeseran konsumsi dari pangan pokok menuju pangan bernilai gizi lebih tinggi. Sebaliknya, pendapatan yang rendah cenderung membatasi pilihan konsumsi pada kelompok pangan pokok yang relatif lebih murah.

Selain pendapatan, pangsa pengeluaran pangan mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan Hukum Engel, semakin tinggi proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk pangan, semakin rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga (Barrett et al. 2018). Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses pangan yang beragam dan berkualitas sehingga kondisi tersebut berkorelasi negatif terhadap kualitas konsumsi pangan (Kudadiri et al. 2025).

Selanjutnya, tingkat pendidikan berperan dalam membentuk pengetahuan gizi, kemampuan mengakses informasi, serta perilaku konsumsi yang lebih sehat dan beragam (Verger et al. 2021). Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi sehingga mampu meningkatkan kualitas pola konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencerminkan dinamika harga yang memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan harga pangan dapat menurunkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan bergizi, terutama pada kelompok berpendapatan rendah (Headey & Alderman, 2019; Laborde et al. 2020).

Secara empiris, kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan karakteristik yang heterogen. Berdasarkan data SUSENAS periode 2021–2025, skor PPH kabupaten/kota di NTB masih berada di bawah standar ideal 100, yang mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan belum optimal. Kondisi ini ditandai oleh dominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian serta rendahnya konsumsi pangan hewani, sayur, dan buah (DKP NTB, 2025). Di sisi lain, terdapat variasi capaian skor PPH antarwilayah yang menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa paradoks pangan di NTB tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek produksi pangan, melainkan memerlukan analisis yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi wilayah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas konsumsi pangan. Novita et al. (2025), Tobing et al. (2025), dan Wahyuni (2025) menunjukkan bahwa pendapatan, pendidikan, pengeluaran pangan, dan harga pangan berpengaruh terhadap kualitas konsumsi pangan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada tingkat rumah tangga atau wilayah tertentu dengan pendekatan cross-section sehingga lebih menekankan variasi antarindividu atau antarrumah tangga dalam satu periode pengamatan. Penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan

bagaimana perbedaan karakteristik sosial ekonomi antarwilayah dan perubahan kondisi dari waktu ke waktu memengaruhi kualitas konsumsi pangan pada tingkat regional.

Selain itu, studi mengenai kualitas konsumsi pangan di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek perilaku konsumsi rumah tangga, sementara penelitian yang menghubungkan skor PPH dengan indikator sosial ekonomi wilayah seperti pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan indeks harga konsumen secara simultan masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan pemahaman mengenai determinan kualitas konsumsi pangan pada level kabupaten/kota belum berkembang secara memadai, terutama pada daerah yang memiliki karakteristik pertanian kuat namun masih menghadapi kualitas konsumsi pangan yang belum optimal seperti Provinsi NTB.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang penting untuk diisi, yaitu belum banyak penelitian yang menganalisis kualitas konsumsi pangan menggunakan pendekatan lintas wilayah dan lintas waktu secara simultan pada tingkat kabupaten/kota dengan mengintegrasikan indikator sosial ekonomi wilayah. Pendekatan ini penting karena kualitas konsumsi pangan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, sosial, dan demografi yang berbeda antarwilayah dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan data kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan yang diukur melalui skor PPH dengan mempertimbangkan variasi antarwilayah dan antarwaktu secara bersamaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada tingkat rumah tangga atau wilayah tertentu secara parsial, penelitian ini mengintegrasikan dimensi spasial dan temporal untuk menjelaskan pengaruh pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan indeks harga konsumen terhadap kualitas konsumsi pangan pada tingkat wilayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas konsumsi pangan pada daerah agraris yang menghadapi paradoks pangan.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025; dan (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas konsumsi pangan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris terdahulu, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- H2 : Pangsa pengeluaran pangan berpengaruh negatif terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- H3 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- H4 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- H5 : Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh negatif terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar empiris dalam perumusan kebijakan peningkatan diversifikasi pangan dan perbaikan kualitas konsumsi pangan berbasis karakteristik sosial ekonomi wilayah di Provinsi NTB, mengingat setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan pola konsumsi pangan yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025 (Iba & Aditya Wardana, 2023; Priyono, 2008). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan indikator kualitas konsumsi pangan, sedangkan analisis

inferensial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah yang menjadi objek penelitian terdiri atas 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data konsumsi pangan rumah tangga yang digunakan untuk menghitung skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Konsumsi dan Pengeluaran periode Maret tahun 2021–2025. Adapun data pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025 (BPS NTB, 2026).

Data penelitian terdiri atas 10 kabupaten/kota selama periode 2021–2025 sehingga menghasilkan 50 observasi. Data tersebut merupakan gabungan data antarwilayah dan antarwaktu yang diperlakukan sebagai pooled data. Pendekatan ini memungkinkan pengamatan variasi kondisi sosial ekonomi dan kualitas konsumsi pangan antar kabupaten/kota serta perubahannya selama periode penelitian. Seluruh observasi kemudian digabungkan menjadi satu set data untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian (Gujarati & Porter, 2010).

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan independen. Variabel dependen yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu indikator kualitas konsumsi pangan berdasarkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yang diperoleh melalui pengolahan data konsumsi pangan, dinyatakan dalam satuan skor. Variabel independen meliputi: (1) pendapatan per kapita, yaitu rata-rata pendapatan masyarakat yang mencerminkan kemampuan ekonomi, dinyatakan dalam satuan rupiah per kapita per bulan; (2) pangsa pengeluaran pangan, yaitu persentase pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga, dinyatakan dalam satuan persen (%); (3) tingkat pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, dinyatakan dalam satuan tahun; (4) jumlah penduduk, yaitu total penduduk pada masing-masing kabupaten/kota, dinyatakan dalam satuan jiwa; serta (5) Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indikator perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli masyarakat, dinyatakan dalam satuan indeks.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi (Priyono, 2008). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, mencatat, dan mengekstraksi data dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan, serta basis data yang tersedia secara publik dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis perkembangan kualitas konsumsi pangan dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas konsumsi pangan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025. Untuk menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan, data konsumsi pangan diolah menggunakan aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis Microsoft Excel 2010 versi Tahun 2023 yang dikembangkan oleh Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional.

Pengolahan data menggunakan aplikasi tersebut menghasilkan output berupa skor Pola Pangan Harapan (PPH), Tingkat Kecukupan Energi (TKE), Tingkat Kecukupan Protein (TKP), konsumsi energi menurut kelompok pangan, serta konsumsi protein nabati dan hewani untuk masing-masing tahun pengamatan. Seluruh indikator dihitung berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal per kapita per hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram per kapita per hari (Badan Pangan Nasional, 2023). Selanjutnya, hasil pengolahan setiap tahun digunakan untuk menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan selama periode penelitian.

Analisis perkembangan kualitas konsumsi pangan mencakup perkembangan skor PPH, rata-rata TKE dan TKP, rata-rata konsumsi energi menurut kelompok pangan, serta rata-rata konsumsi protein nabati dan hewani pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan penyajian grafik dan uraian naratif. Perkembangan skor PPH digunakan untuk menggambarkan

keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan. TKE dan TKP digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan kebutuhan energi dan protein berdasarkan AKG. Sementara itu, konsumsi energi menurut kelompok pangan digunakan untuk melihat kontribusi masing-masing kelompok pangan, dan konsumsi protein nabati serta hewani digunakan untuk menggambarkan pola sumber protein masyarakat selama periode penelitian.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas konsumsi pangan digunakan analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan karena mampu mengukur hubungan antara lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 X5_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Untuk mengurangi perbedaan skala antarvariabel dan mempermudah interpretasi koefisien, model ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln). Transformasi logaritma juga dapat membantu menstabilkan varians data dan mengurangi potensi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 dalam Weriantoni, 2023). Dalam model log-log, koefisien regresi diinterpretasikan sebagai elastisitas, yaitu persentase perubahan skor PPH akibat perubahan satu persen pada variabel independen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dengan demikian, persamaan regresi dalam penelitian ini menjadi:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X1_{it} + \beta_2 \ln X2_{it} + \beta_3 \ln X3_{it} + \beta_4 \ln X4_{it} + \beta_5 \ln X5_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y : Skor Pola Pangan Harapan (PPH), X1: Pendapatan per kapita (Rp/Kapita/Bulan), X2: Pangsa pengeluaran pangan (Persen), X3: Tingkat pendidikan (Tahun), X4: Jumlah penduduk (Jiwa), X5: Indeks Harga Konsumen/IHK (Indeks), β_0 : konstanta, $\beta_1 - \beta_5$: koefisien regresi, e: error term, i: kabupaten/kota dan t: tahun pengamatan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi dan diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 27. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Kelayakan model diuji menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Gujarati & Porter, 2010). Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan model yang semakin baik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap skor PPH, serta uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial pada tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$).

Meskipun data penelitian memiliki dimensi wilayah dan waktu, penelitian ini tidak secara eksplisit mengestimasi efek spesifik kabupaten/kota maupun efek waktu. Oleh karena itu, hasil analisis diinterpretasikan sebagai hubungan statistik pada data gabungan selama periode penelitian. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan data panel yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Periode 2021–2025.

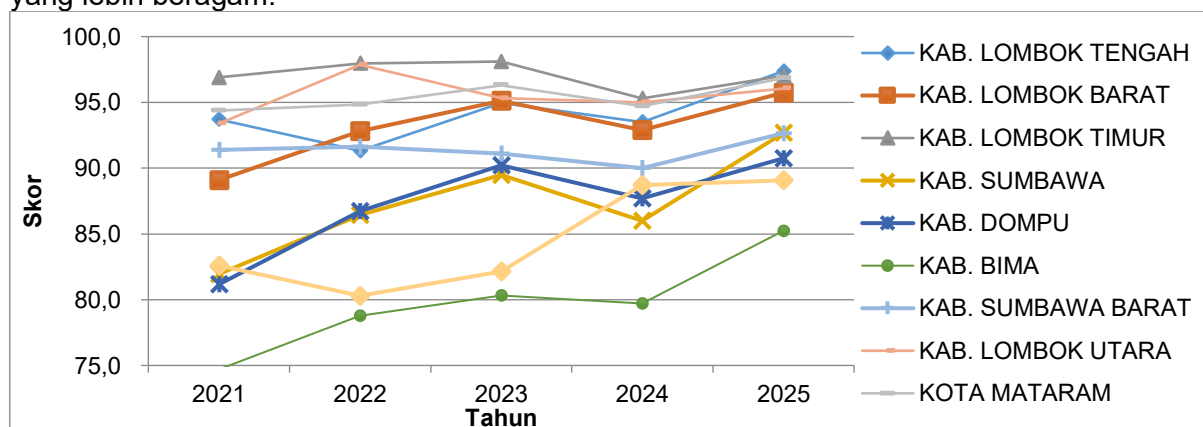
Secara umum, kualitas konsumsi pangan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang tercermin dari kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Namun, peningkatan tersebut belum merata antarwilayah, sehingga masih terdapat disparitas dalam kualitas konsumsi pangan.

Wilayah dengan tingkat urbanisasi dan akses ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki skor PPH yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, sebagian wilayah masih menunjukkan pola konsumsi yang didominasi oleh pangan sumber karbohidrat, dengan konsumsi protein hewani, sayur, dan buah yang relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih berorientasi pada pemenuhan energi, belum sepenuhnya mencerminkan pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan

berkualitas. Hal ini sejalan dengan FAO, (2019) yang menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan energi, tetapi juga oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan.

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Berdasarkan Gambar 1, skor Pola Pangan Harapan (PPH) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan tren meningkat, meskipun beberapa wilayah mengalami fluktuasi. Peningkatan skor PPH mencerminkan perbaikan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat. Kabupaten Lombok Timur mencatat skor tertinggi dengan kisaran 95,3–98,1, diikuti Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat yang sebagian besar berada di atas skor 90. Tingginya skor PPH Lombok Timur didukung oleh konsumsi pangan hewani (359,7 kkal) dan sayur-buah (191,4 kkal) yang telah melampaui angka ideal, menunjukkan pola konsumsi yang lebih beragam dibandingkan wilayah lainnya. Namun demikian, konsumsi padi-padian masih mencapai 1.696,5 kkal atau jauh di atas angka ideal (1.050 kkal), sehingga skor PPH yang tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan berkurangnya dominasi pangan pokok, melainkan menunjukkan bahwa konsumsi pangan pokok telah diimbangi oleh kelompok pangan lain yang lebih beragam.



Sumber: BPS (2021–2025), diolah.

Gambar 1. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025

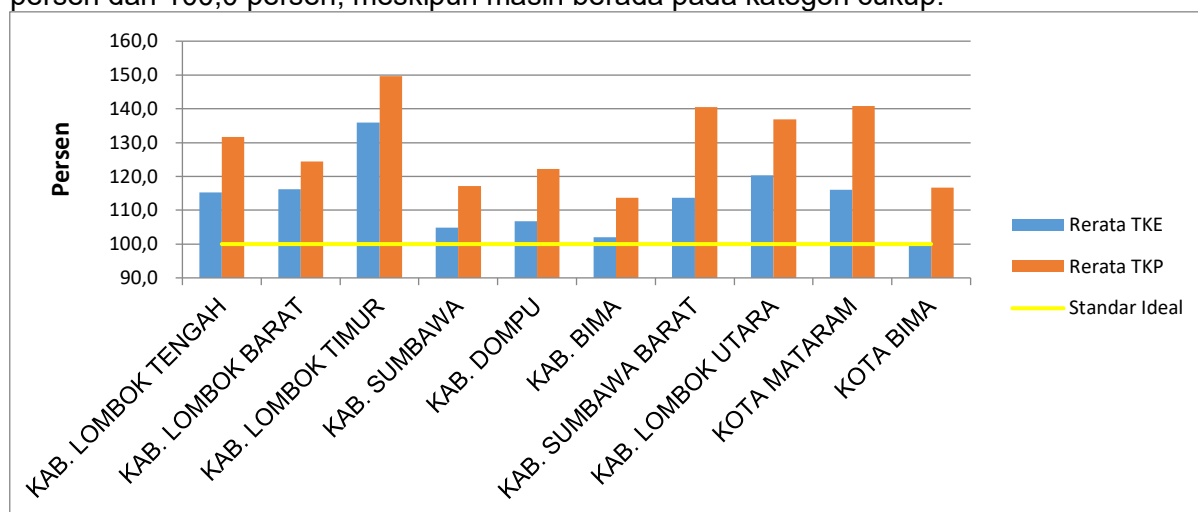
Kabupaten Bima tetap menjadi wilayah dengan skor PPH terendah, meskipun meningkat dari 74,7 pada tahun 2021 menjadi 85,2 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan masyarakat masih belum optimal dan cenderung didominasi oleh pangan sumber karbohidrat. Menurut Ariani & Ashari (2016), rendahnya keragaman konsumsi pangan dipengaruhi oleh dominasi konsumsi pangan pokok dan belum optimalnya pola konsumsi pangan bergizi seimbang.

Beberapa wilayah mengalami penurunan skor pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat pada tahun 2025, seperti Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Kota Mataram. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, daya beli, dan akses pangan masyarakat (Mehraban & Ickowitz, 2021). Secara keseluruhan, sebagian besar kabupaten/kota di NTB telah mencapai skor PPH di atas 90 pada akhir periode penelitian. Meskipun demikian, disparitas antarwilayah masih terlihat, yang tercermin dari selisih skor antara Kabupaten Lombok Timur (98,1) dan Kabupaten Bima (85,2) sebesar 12,9 poin pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan kualitas konsumsi pangan belum sepenuhnya tercapai sehingga upaya diversifikasi pangan dan edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang masih perlu ditingkatkan.

Perkembangan Tingkat Kecukupan Energi (TKE) dan Tingkat Kecukupan Protein (TKP)

Berdasarkan Gambar 2, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata TKE dan TKP di atas 100 persen selama periode pengamatan, yang menunjukkan bahwa kebutuhan energi dan protein masyarakat secara kuantitatif telah terpenuhi. Kabupaten Lombok Timur mencatat capaian tertinggi dengan rata-rata TKE sebesar 135,9 persen dan TKP sebesar 149,7 persen, diikuti Kota Mataram dengan TKP

140,7 persen dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 140,4 persen. Sebaliknya, Kabupaten Bima dan Kota Bima memiliki capaian relatif lebih rendah, dengan TKE masing-masing 102,0 persen dan 100,0 persen, meskipun masih berada pada kategori cukup.



Sumber: BPS (2021–2025), diolah.

Gambar 2. Rata-rata Tingkat Kecukupan Energi (TKE) dan Tingkat Kecukupan Protein (TKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025

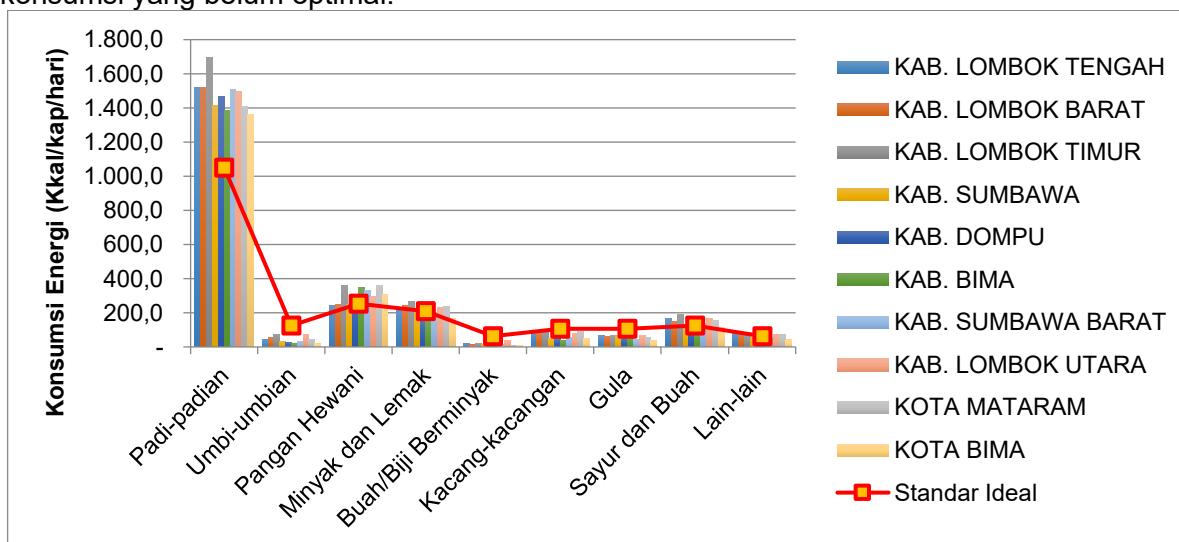
Tingginya capaian TKE dan TKP menunjukkan bahwa permasalahan konsumsi pangan di NTB tidak lagi berfokus pada kecukupan energi dan protein, melainkan pada kualitas dan keragaman konsumsi pangan. Temuan ini terlihat dari perbedaan capaian TKE dan TKP dengan skor PPH di beberapa wilayah. Kabupaten Bima, misalnya, memiliki TKE 102,0 persen dan TKP 113,6 persen, tetapi skor PPH tahun 2025 masih relatif rendah yaitu 85,2, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki TKE dan TKP yang tinggi serta skor PPH mencapai 97,0. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kecukupan kuantitatif dan kualitas konsumsi pangan. Dengan kata lain, terpenuhinya energi dan protein belum menjamin bahwa konsumsi pangan telah beragam dan seimbang sesuai standar PPH. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi pangan masyarakat masih didominasi kelompok pangan tertentu, terutama sumber karbohidrat, sehingga belum mencerminkan pola konsumsi yang beragam dan seimbang. Temuan ini sejalan dengan Wijayati, Harianto and Suryana (2023) yang menyatakan bahwa konsumsi energi masyarakat Indonesia masih didominasi pangan sumber karbohidrat.

Perbedaan capaian TKE dan TKP antarwilayah juga menunjukkan pengaruh kondisi sosial ekonomi dan akses pangan. Wilayah Pulau Lombok seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram cenderung memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan sebagian wilayah Pulau Sumbawa, yang mengindikasikan bahwa urbanisasi, aktivitas ekonomi, dan akses pasar berperan dalam pemenuhan pangan masyarakat. Devi *et al.* (2020) menegaskan bahwa akses ekonomi dan fisik terhadap pangan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas konsumsi rumah tangga. Selain itu, FAO (2019) menyebutkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan energi dan protein, tetapi juga oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan. Dengan demikian, tantangan pembangunan pangan di NTB tidak hanya pada pemenuhan kuantitas konsumsi, tetapi juga peningkatan kualitas dan keragaman pangan masyarakat.

Perkembangan Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan

Berdasarkan Gambar 3, rata-rata konsumsi energi masyarakat kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2021–2025 masih didominasi kelompok padi-padian. Seluruh wilayah memiliki konsumsi padi-padian di atas standar ideal PPH sebesar 1.050 kkal/kapita/hari. Kelebihan konsumsi tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 1.696,5 kkal atau sekitar 646,5 kkal di atas standar, diikuti Kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat yang masing-masing melebihi standar lebih dari 450 kkal. Sebaliknya, konsumsi umbi-umbian masih jauh di bawah standar ideal 126 kkal pada seluruh kabupaten/kota. Defisit terbesar terjadi di Kabupaten Bima dan Kota Bima yang hanya mengonsumsi sekitar 20 kkal per kapita

per hari atau kurang lebih 100 kkal di bawah standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih sangat bergantung pada beras dan belum didukung oleh diversifikasi sumber karbohidrat. Mahmudiono, Andadari and Segalita (2020) menyatakan bahwa dominasi sereal mencerminkan rendahnya diversifikasi pangan dan kualitas konsumsi yang belum optimal.



Sumber: BPS (2021–2025), diolah.

Gambar 3. Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025

Ketidakseimbangan konsumsi juga terlihat pada kelompok pangan lainnya. Konsumsi sayur dan buah di Kabupaten Lombok Timur mencapai 191,4 kkal atau 65,4 kkal di atas standar ideal, sedangkan Kabupaten Bima masih mengalami defisit sekitar 36 kkal. Pada kelompok kacang-kacangan, seluruh wilayah masih berada di bawah standar ideal 105 kkal, dengan defisit terbesar terjadi di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sebaliknya, konsumsi pangan hewani telah melampaui standar ideal 252 kkal di beberapa wilayah, terutama Kota Mataram, Lombok Timur, dan Kabupaten Bima. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan konsumsi pangan di NTB bukan terletak pada kecukupan energi dan protein, melainkan pada ketidakseimbangan konsumsi antar kelompok pangan.

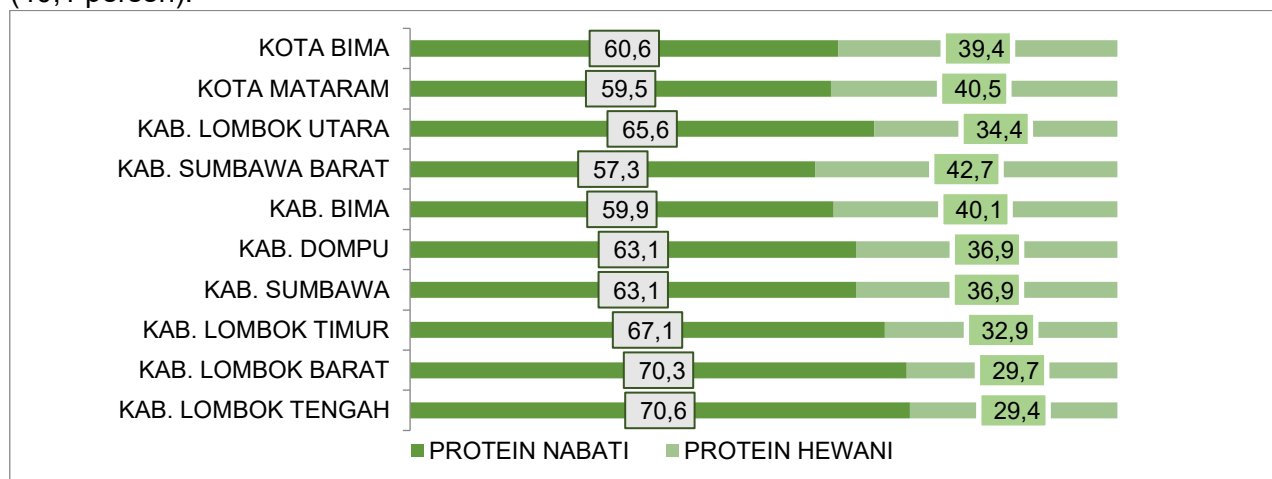
Perbedaan pola konsumsi tersebut turut memengaruhi skor PPH antarwilayah. Kabupaten Bima memiliki konsumsi padi-padian dan pangan hewani yang telah melampaui standar ideal, namun konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah masih rendah sehingga skor PPH tahun 2025 hanya mencapai 85,2. Sebaliknya, Kabupaten Lombok Timur memiliki konsumsi yang lebih mendekati komposisi ideal pada beberapa kelompok pangan penting sehingga menghasilkan skor PPH yang lebih tinggi. FAO (2019) menegaskan bahwa kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan, bukan hanya oleh kecukupan energi.

Secara umum, wilayah dengan akses ekonomi dan pasar yang lebih baik cenderung memiliki pola konsumsi yang lebih beragam. Namun, dominasi padi-padian serta rendahnya konsumsi umbi-umbian dan kacang-kacangan menunjukkan bahwa diversifikasi konsumsi pangan di Provinsi NTB masih belum optimal. Selain itu, konsumsi minyak dan lemak yang melebihi standar ideal di beberapa wilayah perlu mendapat perhatian karena dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular apabila tidak diimbangi pola konsumsi yang seimbang (Thapsuwan et al., 2024).

Perkembangan Konsumsi Protein Nabati dan Protein Hewani

Berdasarkan Gambar 4, rata-rata konsumsi protein penduduk kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2021–2025 masih didominasi oleh protein nabati dengan proporsi 57,3–70,6 persen, sedangkan protein hewani berkisar 29,4–42,7 persen. Proporsi protein nabati tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Tengah (70,6 persen), Lombok Barat (70,3 persen), dan Lombok Timur (67,1 persen). Sebaliknya, proporsi protein hewani relatif lebih tinggi di

Kabupaten Sumbawa Barat (42,7 persen), Kota Mataram (40,5 persen), dan Kabupaten Bima (40,1 persen).



Sumber: BPS (2021–2025), diolah.

Gambar 4. Proporsi (%) Rata-rata Konsumsi Protein Nabati dan Protein Hewani Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025.

Dominasi protein nabati menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat masih bertumpu pada pangan yang lebih terjangkau, seperti beras, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sementara itu, wilayah dengan proporsi protein hewani yang lebih tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi, akses pasar, dan daya beli yang lebih baik. Hoddinott, (2002) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga berhubungan positif dengan peningkatan konsumsi pangan berkualitas tinggi, termasuk pangan hewani, melalui peningkatan keragaman konsumsi pangan.

Meskipun tidak menjadi determinan langsung skor PPH, proporsi konsumsi protein hewani dapat digunakan sebagai indikator kualitas gizi konsumsi pangan. Day et al. (2022) menegaskan bahwa protein hewani memiliki kualitas gizi yang lebih baik karena mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Oleh karena itu, tingginya proporsi protein nabati di NTB menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat telah mencukupi secara kuantitatif, namun kualitas protein yang dikonsumsi masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian, upaya diversifikasi pangan dan peningkatan akses terhadap sumber protein hewani tetap diperlukan untuk mendukung perbaikan kualitas gizi masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Konsumsi Pangan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2025.

Uji Asumsi Klasik.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sehingga hasil estimasi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pengujian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi

No	Uji Asumsi	Metode	Kriteria Pengujian	Hasil Utama	Kesimpulan
1	Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Sig. > 0,05	Sig. 0,149	Residual berdistribusi normal
2	Multikolinearitas	Tolerance & VIF	Tolerance > 0,10; VIF < 10	Tolerance 0,364–0,907; VIF 1,102–2,745	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Heteroskedastisitas	Glejser	Sig. > 0,05	Sig. 0,054–0,994 (seluruh variabel > 0,05)	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa seluruh uji asumsi klasik telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Residual terdistribusi normal, tidak ditemukan gejala multikolinearitas antarvariabel independen, serta tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi BLUE dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Berdasarkan hasil estimasi regresi linear berganda pada Tabel 4, variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kualitas Konsumsi Pangan yang ditunjukkan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan variabel independen terdiri atas pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tabel 4: Hasil Estimasi Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Skor PPH di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	t hitung	Sig.
Konstanta	-0,200	–	-0,149	0,882
Pendapatan Per Kapita (X1)	0,299	1,018	7,094	0,000
Pangsa Pengeluaran Pangan (X2)	0,272	0,361	2,436	0,019
Tingkat Pendidikan (X3)	-0,303	-0,770	-5,232	0,000
Jumlah Penduduk (X4)	0,005	0,054	0,479	0,634
Indeks Harga Konsumen/IHK (X5)	-0,004	-0,002	-0,016	0,987
Variabel Dependen (Y)	: Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
Nilai R	: 0,805			
R ²	: 0,647			
Adjusted R ²	: 0,607			
Std. Error of the Estimate	: 0,04255			
F hitung	: 16,148			
Prob (Sig. F)	: 0,000			
Taraf Kepercayaan	: 95% (α = 0,05)			

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,805 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dengan skor PPH berada pada kategori kuat. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,647 menunjukkan bahwa sebesar 64,7 persen variasi skor PPH dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Setelah dilakukan penyesuaian, nilai Adjusted R² sebesar 0,607 mengindikasikan bahwa 60,7 persen variasi skor PPH dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 39,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 16,148 dengan probabilitas (Sig. F) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 pada taraf kepercayaan 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap skor PPH, sehingga model regresi yang digunakan layak sebagai alat analisis dalam penelitian. Selain itu, nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 0,04255 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model relatif kecil, sehingga model cukup baik dalam menjelaskan variasi skor PPH antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = -0,200 + 0,299 \ln X1_{it} + 0,272 \ln X2_{it} - 0,303 \ln X3_{it} + 0,005 \ln X4_{it} - 0,004 \ln X5_{it}$$

Keterangan:

Y: Skor PPH, X1: Pendapatan per kapita, X2: Pangsa pengeluaran pangan, X3: Tingkat pendidikan, X4: Jumlah penduduk, X5: Indeks Harga Konsumen (IHK), *i*: kabupaten/kota, dan *t*: tahun pengamatan (2021–2025).

Karena model yang digunakan merupakan model logaritma ganda (log-log), maka setiap koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Dengan demikian, setiap perubahan sebesar 1 persen pada variabel independen akan menyebabkan perubahan

persentase pada skor PPH sebesar nilai koefisien regresinya, dengan asumsi variabel lain konstan. Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, dan jumlah penduduk memiliki arah pengaruh positif terhadap skor PPH. Sebaliknya, tingkat pendidikan dan IHK memiliki arah pengaruh negatif terhadap skor PPH.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4, variabel pendapatan per kapita (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor PPH dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien regresi sebesar 0,299 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan skor PPH sebesar 0,299 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel pangsa pengeluaran pangan (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor PPH dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Koefisien regresi sebesar 0,272 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pangsa pengeluaran pangan sebesar 1 persen akan meningkatkan skor PPH sebesar 0,272 persen. Sementara itu, variabel tingkat pendidikan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor PPH dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien regresi sebesar -0,303 menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 persen akan menurunkan skor PPH sebesar 0,303 persen, dengan asumsi variabel lain konstan.

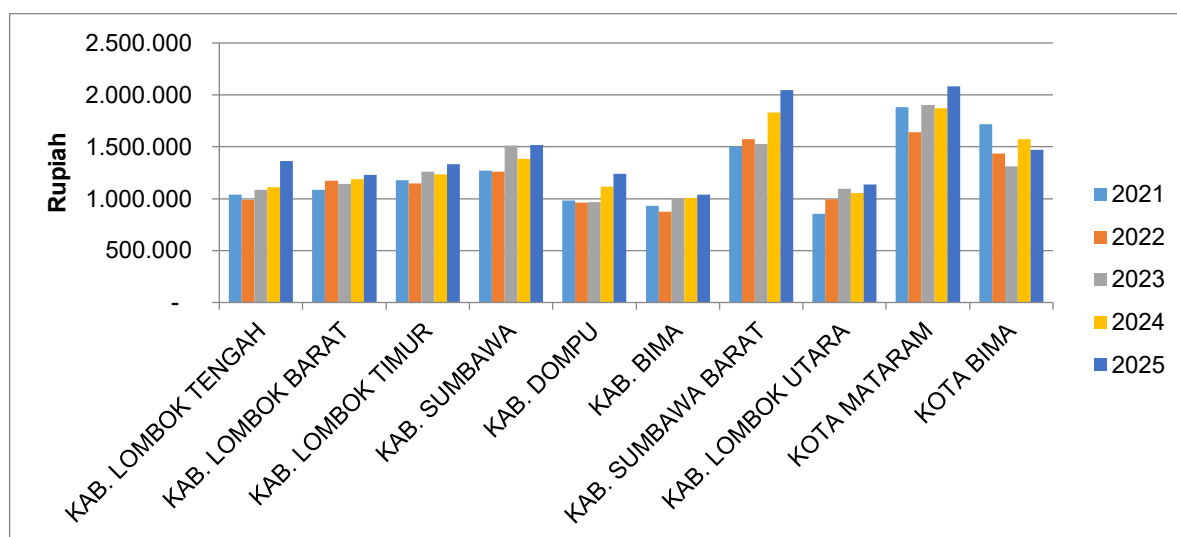
Di sisi lain, variabel jumlah penduduk (X4) memiliki koefisien positif sebesar 0,005, yang berarti setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen cenderung meningkatkan skor PPH sebesar 0,005 persen. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,634 yang lebih besar dari 0,05. Demikian pula, variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki koefisien negatif sebesar -0,004 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan IHK sebesar 1 persen cenderung menurunkan skor PPH sebesar 0,004 persen. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya sebesar 0,987 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap skor PPH di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025. Sementara itu, jumlah penduduk dan IHK belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan skor PPH pada periode penelitian.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap skor PPH diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan Gambar 5, perkembangan pendapatan per kapita kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan adanya fluktuasi serta disparitas antarwilayah. Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan Kabupaten Bima, Dompu, dan Lombok Utara berada pada kelompok pendapatan yang lebih rendah.

Perbedaan tersebut mencerminkan ketimpangan struktur ekonomi antarwilayah, di mana wilayah dengan aktivitas ekonomi perkotaan dan investasi cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan wilayah berbasis sektor primer. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi rumah tangga dalam mengakses pangan yang lebih beragam masih berbeda antarwilayah (Prihatin, A. S. et al. 2021).



Sumber: BPS NTB (2026)

Gambar 5. Perkembangan Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2021–2025

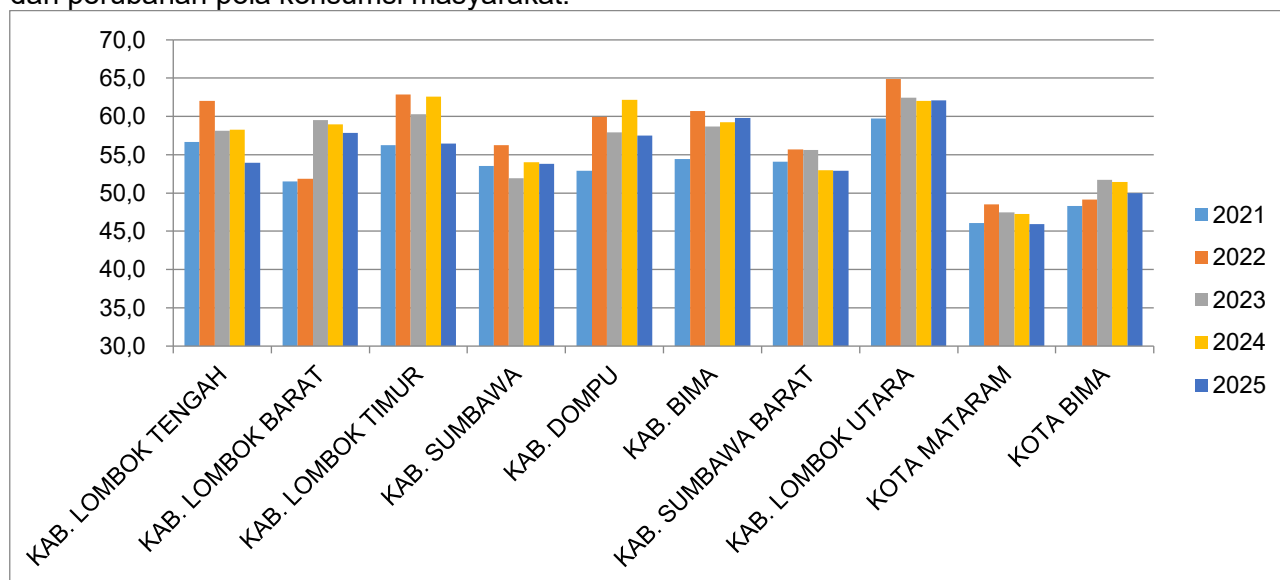
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien regresi sebesar 0,299 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$). Dalam model log-log, koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 persen berasosiasi dengan peningkatan skor PPH sebesar 0,299 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap skor PPH. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kemampuan rumah tangga dalam mengakses dan mengonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi, dan berkualitas, termasuk pangan hewani, buah-buahan, dan sayuran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sibhatu & Qaim (2017) serta Verger et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pendapatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan akses terhadap pangan bergizi dan mendorong diversifikasi konsumsi pangan. Temuan ini juga didukung oleh Rinaldi et al. (2017) yang menyatakan bahwa rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan seimbang.

Secara spasial, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan tingkat pendapatan per kapita yang relatif tinggi dan diikuti oleh skor PPH yang cenderung tinggi serta stabil selama periode 2021–2025 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Sebaliknya, Kabupaten Bima dan Kota Bima memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dengan skor PPH yang juga relatif lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lainnya. Fluktuasi pendapatan pada beberapa daerah turut diikuti oleh perubahan skor PPH, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kualitas konsumsi pangan. Peningkatan pendapatan mendorong kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang lebih beragam dan bergizi. Namun demikian, kualitas konsumsi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pengetahuan gizi, preferensi konsumsi, budaya makan, dan aksesibilitas pangan masyarakat (Enriquez & Archila-Godinez, 2022). Oleh karena itu, peningkatan pendapatan perlu diiringi dengan edukasi gizi dan penguatan diversifikasi pangan lokal guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Pangsa Pengeluaran Pangan

Berdasarkan Gambar 6, pangsa pengeluaran pangan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan variasi antarwilayah dengan kecenderungan lebih tinggi pada wilayah kabupaten dibandingkan kota. Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Dompu, dan Bima memiliki pangsa pengeluaran pangan yang relatif tinggi, sedangkan Kota Mataram menunjukkan proporsi terendah selama periode pengamatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah kabupaten masih mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan,

yang secara teoritis mencerminkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah sesuai dengan Hukum Engel (Barrett et al. 2018). Sebaliknya, wilayah perkotaan cenderung memiliki proporsi pengeluaran nonpangan yang lebih besar seiring meningkatnya tingkat pendapatan dan perubahan pola konsumsi masyarakat.



Sumber: BPS NTB (2021–2025).

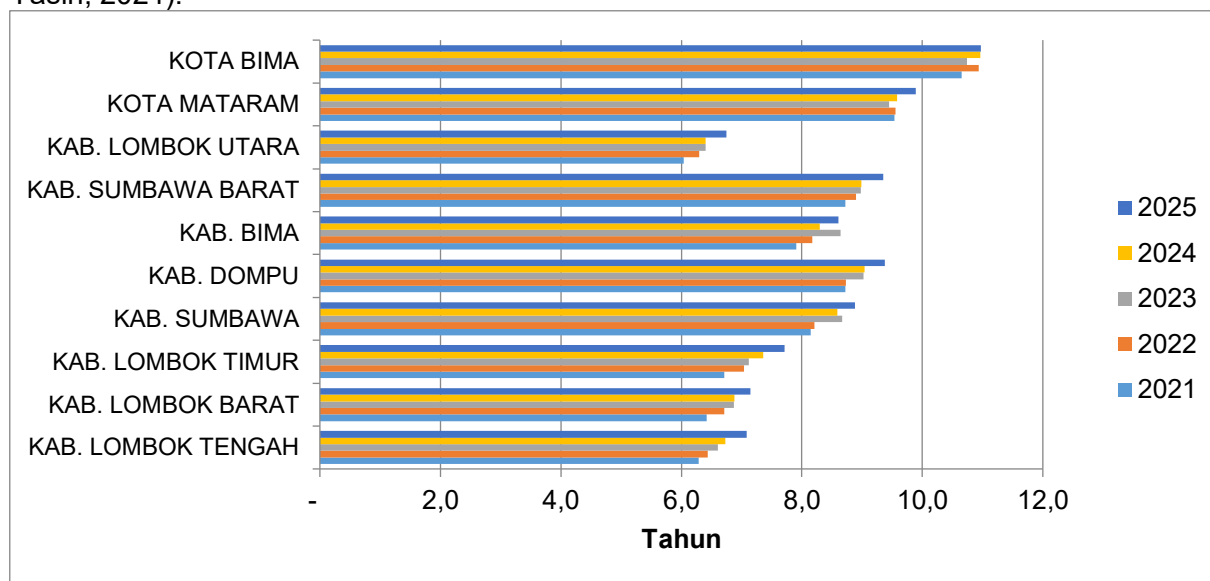
Gambar 6. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021–2025

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien regresi sebesar 0,272 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 ($<0,05$). Dalam model log-log, koefisien tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan pangsa pengeluaran pangan sebesar 1 persen berasosiasi dengan peningkatan skor PPH sebesar 0,272 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian (H2) yang menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan berpengaruh negatif terhadap skor PPH. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan pada kabupaten/kota di Provinsi NTB cenderung diikuti oleh peningkatan kualitas konsumsi pangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tambahan pengeluaran pangan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, tetapi juga untuk mengakses pangan yang lebih beragam dan bergizi, seperti pangan hewani, buah-buahan, dan sayuran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sibhatu & Qaim (2017) dan Verger et al. (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pangan dapat mendorong diversifikasi konsumsi dan perbaikan kualitas pangan rumah tangga.

Namun demikian, peningkatan kualitas konsumsi pangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh diversifikasi konsumsi yang optimal. Selama periode penelitian, pola konsumsi masyarakat NTB masih didominasi oleh kelompok padi-padian sehingga perbaikan kualitas konsumsi pangan belum berlangsung secara merata antar kelompok pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pangan, tetapi juga oleh faktor lain seperti pengetahuan gizi, preferensi konsumsi, budaya makan, dan aksesibilitas pangan. Temuan ini sejalan dengan Headey & Alderman (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pangan belum tentu diikuti oleh konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi. Oleh karena itu, peningkatan daya beli masyarakat perlu diiringi dengan edukasi gizi dan penguatan diversifikasi pangan lokal agar pengeluaran pangan lebih banyak dialokasikan pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar 7, tingkat pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat, meskipun masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kota Bima dan Kota Mataram memiliki tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas yang relatif lebih tinggi, sedangkan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan rata-rata lama sekolah terendah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya disparitas akses pendidikan dan fasilitas sosial antarwilayah (Edo & Yasin, 2024).



Sumber: BPS NTB (2021–2025).

Gambar 7. Perkembangan Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2021–2025

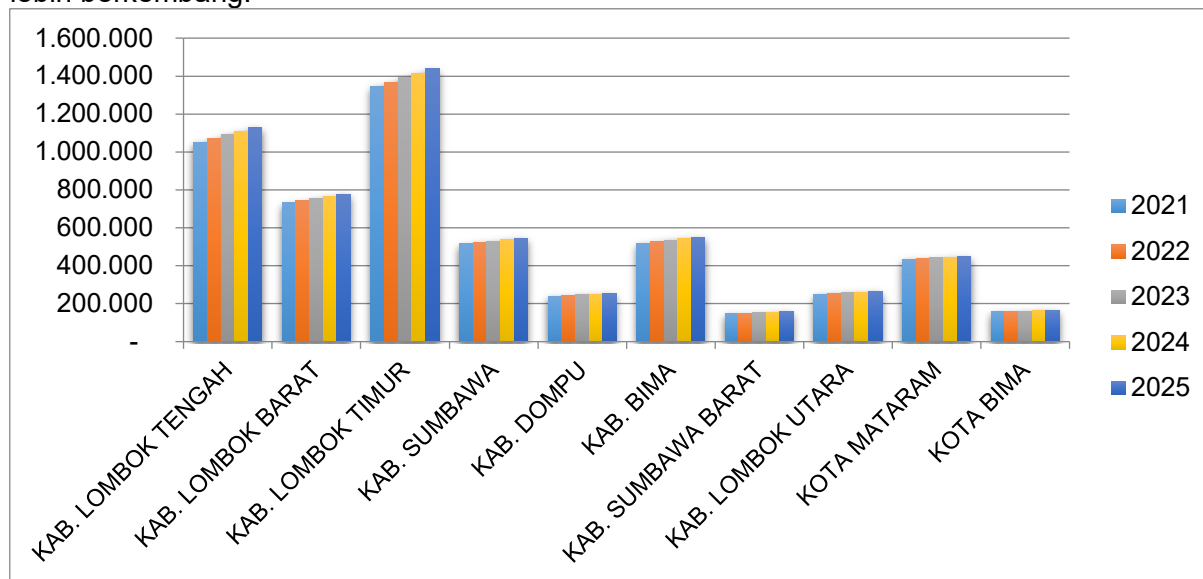
Secara teoritis, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan gizi, kemampuan memilih pangan, serta kesadaran terhadap konsumsi pangan yang sehat dan beragam. Ariani dan Ashari (2016) serta Sanlier et al. (2024) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula pemahaman terhadap konsumsi pangan bergizi dan seimbang. FAO (2019) juga menegaskan bahwa kualitas konsumsi pangan dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh pengetahuan dan perilaku konsumsi masyarakat.

Namun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien regresi sebesar $-0,303$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 (<0,05)$. Dalam model log-log, setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 persen berasosiasi dengan penurunan skor PPH sebesar $0,303$ persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian (H3) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap skor PPH. Kondisi tersebut juga terlihat pada Gambar 7, di mana wilayah dengan tingkat pendidikan relatif tinggi tidak selalu memiliki skor PPH yang lebih tinggi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal yang lebih tinggi belum tentu diikuti oleh perbaikan pola konsumsi pangan. Pada beberapa wilayah, peningkatan pendidikan dapat disertai perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak selalu mengarah pada konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi. Kondisi ini sejalan dengan teori transisi pangan yang dikemukakan oleh Popkin, (1999), bahwa modernisasi dan perubahan sosial dapat mendorong pergeseran pola makan masyarakat menuju konsumsi pangan olahan dan siap saji. Verger et al. (2021) juga menegaskan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan tanpa diiringi pengetahuan gizi dan perilaku konsumsi yang baik. Oleh karena itu, hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan skor PPH perlu diinterpretasikan secara hati-hati serta memerlukan kajian lebih lanjut.

Jumlah Penduduk

Berdasarkan Gambar 8, jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat di seluruh wilayah. Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima memiliki jumlah penduduk relatif lebih kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk di NTB masih terpusat di Pulau Lombok, terutama pada wilayah dengan aktivitas ekonomi dan pusat permukiman yang lebih berkembang.



Sumber: BPS NTB (2021–2025).

Gambar 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025.

Secara teoritis, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan dan memberikan tekanan terhadap sistem penyediaan pangan daerah. Fukase & Martin (2020) menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan, sedangkan Purwaningsih (2008) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan permintaan pangan rumah tangga baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

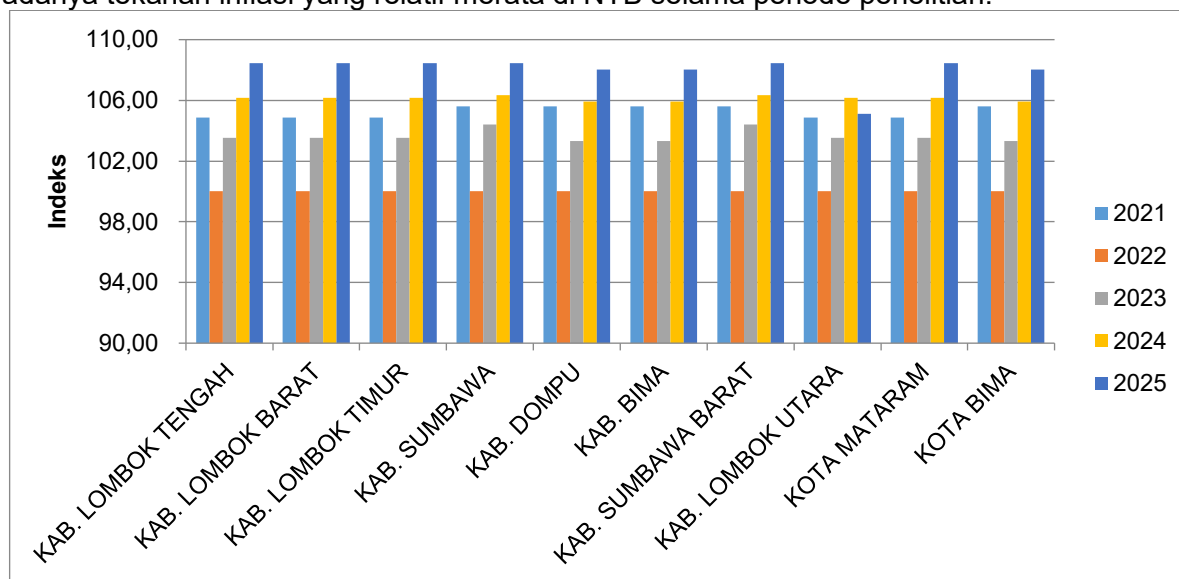
Hipotesis penelitian (H4) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH). Namun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien sebesar 0,005 dan nilai signifikansi 0,634 ($>0,05$). Dalam model log-log, koefisien ini menunjukkan elastisitas yang sangat kecil, yaitu kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen hanya diikuti peningkatan skor PPH sebesar 0,005 persen, namun tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis H4 ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa variasi jumlah penduduk antarwilayah belum menjadi faktor utama yang menentukan kualitas konsumsi pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah dengan jumlah penduduk besar tidak selalu memiliki skor PPH lebih rendah, dan sebaliknya. Sebagai contoh, Kabupaten Lombok Utara yang memiliki rata-rata jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan Kabupaten Lombok Tengah pada periode 2021–2025 justru menunjukkan skor PPH yang relatif lebih baik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan ekonomi, akses pangan, dan pola konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Debebe & Zekarias (2020) serta FAO (2019) yang menekankan bahwa ketahanan pangan lebih ditentukan oleh akses dan kemampuan ekonomi dibandingkan jumlah penduduk. Dengan demikian, peningkatan kualitas konsumsi pangan di NTB perlu difokuskan pada penguatan akses pangan, peningkatan kesejahteraan, dan diversifikasi konsumsi pangan.

Indeks Harga Konsumen (IHK).

Berdasarkan Gambar 9, Indeks Harga Konsumen (IHK) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat dengan kisaran nilai antara 104,88–108,47. Secara umum, seluruh wilayah mengalami kecenderungan kenaikan IHK, meskipun terdapat variasi antar kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan inflasi yang relatif merata di NTB selama periode penelitian.



Sumber: BPS NTB (2021–2025).

Gambar 9. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2021–2025

Secara teoritis, kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencerminkan meningkatnya harga barang dan jasa yang dapat menurunkan daya beli rumah tangga apabila tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan (Mankiw et al., 2018). Dalam konteks konsumsi pangan, kondisi ini berpotensi membatasi akses terhadap pangan yang bergizi dan beragam (Headey & Alderman, 2019).

Hipotesis penelitian (H5) menyatakan bahwa IHK berpengaruh negatif terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH). Namun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa IHK tidak berpengaruh signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien sebesar -0,004 dan nilai signifikansi 0,987 ($>0,05$). Dalam model log-log, koefisien tersebut dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas, yang berarti bahwa peningkatan IHK sebesar 1 persen hanya diikuti penurunan skor PPH sebesar 0,004 persen, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis H5 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan IHK selama periode penelitian tidak secara nyata memengaruhi variasi skor PPH antarwilayah sebagaimana tercermin pada Gambar 9. Tidak signifikannya pengaruh IHK diduga karena variasi IHK antarwilayah relatif kecil serta adanya kecenderungan rumah tangga untuk tetap mempertahankan pengeluaran pangan meskipun terjadi kenaikan harga. Kondisi ini juga tercermin dari masih tingginya pangsa pengeluaran pangan di sebagian besar wilayah.

Hasil ini sejalan dengan Laborde et al. (2020) dan Verger et al. (2021) yang menegaskan bahwa dampak perubahan harga terhadap kualitas konsumsi pangan lebih banyak ditentukan oleh pendapatan, pola konsumsi, serta kemampuan adaptasi rumah tangga. Dengan demikian, perubahan IHK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 belum menjadi faktor utama yang memengaruhi skor PPH, karena kualitas konsumsi pangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pendapatan dan pola alokasi pengeluaran pangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas konsumsi pangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa: (1) kualitas konsumsi pangan pada kabupaten/kota di Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan

selama periode 2021-2025. Namun demikian, masih terdapat disparitas antarwilayah, terutama antara kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Meskipun TKE dan TKP telah melampaui standar kecukupan, kualitas konsumsi pangan belum optimal yang ditandai oleh dominasi kelompok padi-padian serta rendahnya konsumsi pangan sumber protein hewani, sayur, buah, dan umbi-umbian; (2) pendapatan per kapita dan pangsa pengeluaran pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor PPH, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, jumlah penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap skor PPH dengan kemampuan penjelasan model sebesar 60,7 persen. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita dan pola pengeluaran pangan menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kualitas konsumsi pangan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi NTB.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan diversifikasi konsumsi pangan melalui pengembangan pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), khususnya di wilayah dengan skor PPH relatif rendah, serta didukung oleh pengembangan dan promosi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada kelompok padi-padian; (2) program peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui penguatan pendapatan rumah tangga, karena pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas konsumsi pangan; (3) diperlukan penguatan edukasi gizi dan literasi pangan secara berkelanjutan serta peningkatan pemerataan akses pangan antarwilayah, khususnya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, guna mengurangi disparitas kualitas konsumsi pangan; (4) penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti harga pangan spesifik, aksesibilitas pangan, budaya konsumsi, dan preferensi rumah tangga agar analisis faktor-faktor yang memengaruhi PPH menjadi lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, baik dalam penyediaan data, dukungan teknis, maupun masukan yang berharga selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., & Ashari. (2016). Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(2), 99. <https://doi.org/10.21082/fae.v21n2.2003.99-112>
- Badan Pangan Nasional. (2023). *Perbadan 11 Tahun 2023 Pola Pangan Harapan*.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional dan Provinsi Tahun 2019 - 2023*. Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan. <https://badanpangan.go.id/buku-digital>
- Barrett, G., Chai, A., Chang, S., Jetter, M., Liu, H., & Taylor, G. (2018). Quality Of Food Consumption. *Amer. J. Agr. Econ, January*. <https://doi.org/10.1093/ajae/aax053>
- Béné, C., Bakker, D., Chavarro, M. J., Even, B., Melo, J., & Sonneveld, A. (2021). Global assessment of the impacts of COVID-19 on food security. *Global Food Security*, 31, 100575. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100575>
- BPS. (2021). *Data Agregat Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021*.
- BPS. (2022). *Data Agregat Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2022*.
- BPS. (2023). *Data Agregat Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023*.
- BPS. (2024). *Data Agregat Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2024*.
- BPS. (2025). *Data Agregat Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2025*.
- BPS NTB. (2026). *Indikator Strategis Statistik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021-2025 (Vol. 8)*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Day, L., Cakebread, J. A., & Loveday, S. M. (2022). Food proteins from animals and plants: Differences in the nutritional and functional properties. *Trends in Food Science and*

- Technology*, 119(December 2021), 428–442. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.12.020>
- Debebe, S., & Zekarias, E. H. (2020). Analysis of poverty, income inequality and their effects on food insecurity in southern Ethiopia. *Agriculture & Food Security*, 9(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s40066-020-00269-3>
- Devi, Y. L., Andari, Y., Wihastuti, L., & Haribowo, K. (2020). Model Sosial-Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia (Socio-Economic Model and Household Food Security in Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 103–115.
- DKP NTB. (2025). *Buku Direktori Pola Pangan Harapan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025*. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(3), 317–326. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i3.175>
- Enriquez, J. P., & Archila-Godinez, J. C. (2022). Social and cultural influences on food choices: A review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 62(13), 3698–3704. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1870434>
- FAO; IFAD; UNICEF; WFP; & WHO. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. In *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8b27c570-2f8b-4350-8d5a-8e82432e6db7/content>
- FAO. (1996). World Food Security. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 16(2), 39–55.
- FAO. (2019). *The State of Food Security and Nutrition in the Word - Safeguarding Against Economic Slowdowns and Downturns*. FAO United Nations.
- Fukase, E., & Martin, W. (2020). Economic growth, convergence, and world food demand and supply. *World Development*, 132, 104954. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104954>
- Gil, J. D. B., Reidsma, P., Giller, K., Todman, L., Whitmore, A., & van Ittersum, M. (2019). Sustainable development goal 2: Improved targets and indicators for agriculture and food security. *Ambio*, 48(7), 685–698. <https://doi.org/10.1007/s13280-018-1101-4>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Essentials of Econometrics* (Anne E. Hilbert (ed.); Fourth, Issue March). McGraw-Hill/Irwin.
- Headey, D. D., & Alderman, H. H. (2019). The Relative Caloric Prices of Healthy and Unhealthy Foods Differ Systematically across Income Levels and Continents. *Journal of Nutrition*, 149(11), 2020–2033. <https://doi.org/10.1093/jn/nxz158>
- Hoddinott, J. and Y. Y. (2002). Dietary Diversity as a Household Food Security Indicator. In *Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA)* (Vol. 136, Issue May). Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA). <http://www.fantaproject.org/research/dietary-diversity-household-food-security>
- Iba, Z., & Aditya Wardana. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana (ed.); Vol. 5, Issue 2). CV Eureka Media Aksara.
- Islah Sahbana Kudadiri, & Nazwa Aurelia Sinaga. (2025). Pengaruh Inflasi terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 309–313. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1581>
- Laborde, D., Martin, W., Swinnen, J., & Vos, R. (2020). COVID-19 risks to global food security. *Science*, 369(6503), 500–502. <https://doi.org/10.1126/science.abc4765>
- Mahmudiono, T., Suro Andadari, D. P. P., & Segalita, C. (2020). Difference in the Association of Food Security and Dietary Diversity with and without Imposed Ten Grams Minimum Consumption. *Journal of Public Health Research*, 9(3), 316–320. <https://doi.org/10.4081/jphr.2020.1736>
- Mankiw, N. G., Ghent, L., Mankiw, N. G., Ghent, L. S., Calhoun, J. W., Tufts, J., Baker, J. E., Joyner, B., True, V., Cowden, D., Schaffer, K., Berger, E., & Kunkler, M. (2018). *Instructor 's Manual with Solutions Manual Principles of Macroeconomics* (FOURTH EDI).
- Mehraban, N., & Ickowitz, A. (2021). Dietary diversity of rural Indonesian households declines over time with agricultural production diversity even as incomes rise. *Global Food*

- Security*, 28, 100502. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100502>
- Novita, S., Damayanti, Y., & Nurchaini, D. S. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 9, 535–544.
- Popkin, B. M. (1999). Urbanization, lifestyle changes and the nutrition transition. *World Development*, 27(11), 1905–1916. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00094-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00094-7)
- Prihatin, A. S., Marwanti, S., & Fajarningsih, R. U. (2021). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Diversifikasi Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. *Agrista*, 9(3), 143–153.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif* (T. Chandra (ed.); Edisi Revi). Zifatama Publishing.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>
- Rinaldi, Y., Irianto, H., & Rahayu, W. (2017). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga Anggota Kelompok Tani di Kecamatan Ngunter Kabupaten Sukoharjo. *Agrista*, 5(3), 441–452.
- Sanlier, N., Kocaay, F., Kocabas, S., & Ayyildiz, P. (2024). The Effect of Sociodemographic and Anthropometric Variables on Nutritional Knowledge and Nutrition Literacy. *Foods*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/foods13020346>
- Sibhatu, K. T., & Qaim, M. (2017). Rural food security, subsistence agriculture, and seasonality. *PLOS ONE*, 12(10), e0186406. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186406>
- Thapsuwan, S., Phulkard, S., Chamratrithong, A., Gray, R. S., Jindaratnaporn, N., Loyfah, N., Thongcharoenchupong, N., & Pattaravanich, U. (2024). Relationship between consumption of high fat, sugar or sodium (HFSS) food and obesity and non-communicable diseases. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 7(1), 78–87. <https://doi.org/10.1136/bmjnp-2023-000794>
- Tobing, L. L., Dewi, N., Restuhadi, F., Studi, P., Agribisnis, M., Pertanian, F., Riau, U., Artikel, H., Bandar, K., Kijang, S., & Tangga, R. (2025). Analisis Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Agribisnis*, 27.
- Verger, E. O., Gaillard, C., Jones, A. D., & Remans, R. (2021). Construction and Interpretation of Production and Market Metrics Used to Understand Relationships with Dietary Diversity of Rural Smallholder Farming Households. *Agriculture*, 11.
- Wahyuni, L. (2025). Hubungan Karakteristik Petani dengan Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit. *Journal Sosial Economic Of Agriculture*, 14(1), 45–55.
- Weriantoni. (2023). Analisis Permintaan Telur Pada IKM Rendang di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(2), 357–365. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.17558>
- Wijayati, P. D., Harianto, N., & Suryana, A. (2023). Permintaan Pangan Sumber Karbohidrat di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17(1), 13–26. <https://doi.org/10.21082/akp.v17n1.2019.13-26>
- Yuniarti, D., Purwaningsih, Y., Soesilo, A., & Suryantoro, A. (2022). Food Diversification and Dynamic Food Security: Evidence from Poor Households. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 23(1), 43–55. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i1.16302>